

Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Penciptaan *Green Jobs* dalam Kerangka Kebijakan *Low Carbon Development* di Indonesia

Oleh:

Darmawan Salman

Alizar Anwar

Aldi Muhammad Alizar

Yusdi Usman

Ratih Damayanti



IAP2 bermitra dengan UNESCAP untuk membuat proposal ke PBB untuk International Year of Participation. Kami mengundang organisasi masyarakat sipil, bisnis, akademisi, individu dan asosiasi media untuk mendukung kampanye partisipasi publik dan fokus pada partisipasi untuk meningkatkan hasil sosial, ekonomi dan lingkungan untuk semua, termasuk untuk kelompok rentan, dan pencapaian SDGs.

RINGKASAN

Green Jobs

Pembangunan rendah karbon sudah menjadi pendekatan baru dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga sudah mulai menjadikan pendekatan ini secara serius, meskipun berbagai tantangan masih dihadapi, baik di level proses politik, kondisi *status quo*, dinamika birokrasi, dan sebagainya. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan adanya kolaborasi multipihak dalam upaya memperkuat kebijakan ini di berbagai tingkatan dan arena. Jika kebijakan pembangunan rendah karbon ini berjalan bagus, maka upaya penciptaan lapangan kerja hijau (*green jobs*) akan menjadi harapan baru bagi generasi muda kita ke depan.

Karena itu, kertas kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Potensi *green jobs* dalam pembangunan rendah karbon sangat besar, baik di tingkat nasional maupun global. Jika pembangunan rendah karbon berjalan dengan baik, maka sebanyak 65 juta *green jobs* di tingkat global akan tercipta pada 2030 dan 15,3 juta *green jobs* di Indonesia akan tercipta pada tahun 2045. Karena itu, diperlukan kesungguhan pemerintah dan semua pihak untuk memperkuat pembangunan rendah karbon di semua aspek dan arena.
2. Dalam penciptaan *green jobs*, aktor-aktor ekonomi adalah pihak yang perlu diperkuat literasinya tentang pembangunan rendah karbon, baik BUMN/D, korporasi swasta, UMKM, dan rumah tangga. Jika aktor-aktor ekonomi ini memberikan dukungan yang bagus dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon, maka kita bisa berharap bahwa upaya penciptaan lapangan kerja hijau juga akan meningkat ke depan.
3. Untuk memperkuat partisipasi aktor-aktor ekonomi tersebut, yakni BUMN/D, korporasi swasta, UMKM, dan rumah tangga dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan penciptaan lapangan kerja hijau, maka spektrum partisipasi publik/*green engagement* bisa digunakan oleh pemerintah dan semua pihak, sesuai fungsi dan kebutuhan. Lima spektrum *green engagement* yang bisa digunakan adalah *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower*.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN <i>GREEN JOBS</i>	4
1.1 PENGANTAR.....	4
1.2 POTENSI <i>GREEN JOBS</i> DALAM PEMBANGUNAN RENDAH KARBON.....	6
1.3 TANTANGAN PERLUASAN <i>GREEN JOBS</i> BERBASIS AKTOR EKONOMI.....	9
BAB 2 PARTISIPASI PUBLIK UNTUK PERLUASAN <i>GREEN JOBS</i>	12
2.1 URGENSI <i>GREEN ENGAGEMENT</i> /KOLABORASI.....	12
2.2 KEBUTUHAN <i>GREEN ENGAGEMENT</i> /KOLABORASI.....	13
BAB 3 REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN.....	18
Tim Penulis.....	18
Metodologi.....	18
Profil IAP2 Indonesia.....	18

BAB 1

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN *GREEN JOBS*

1.1 PENGANTAR

Selama puluhan tahun, Indonesia menerapkan pendekatan pembangunan yang berbasis pada *business as usual*, yakni pembangunan yang bertumpu pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Pendekatan *business as usual* tidak bisa lagi dipertahankan karena akan mengancam keberlanjutan, menurunnya daya dukung sumber daya, dan terjadinya degradasi lingkungan hidup. Bukan hanya itu, pendekatan *business as usual* juga membawa berbagai dampak buruk pada kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ancaman eksehatan karena polusi udara, ancaman bencana karena kerusakan hutan dan lingkungan hidup, maupun ancaman tidak berlanjutnya pembangunan karena daya dukung yang terus menyusut.

Perubahan iklim adalah dampak lain dari pendekatan *business as usual* dalam pembangunan yang kita lakukan selama ini. Perubahan iklim sebagai akibat dari meningkatnya suhu bumi akan mengancam produktivitas pangan kita yang secara langsung meningkatkan potensi kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan yang berbasis pada *business as usual* hanya akan menghasilkan ketidakberlanjutan dalam pembangunan kita. Hal itu karena sumber daya alam yang terkuras dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Karena itu, transformasi ke arah pembangunan rendah karbon merupakan sebuah pilihan satu-satunya dalam rangka mempersiapkan masa depan pembangunan kita yang lebih manusiawi dan ramah lingkungan, serta memberi keberlanjutan kepada generasi yang akan datang.

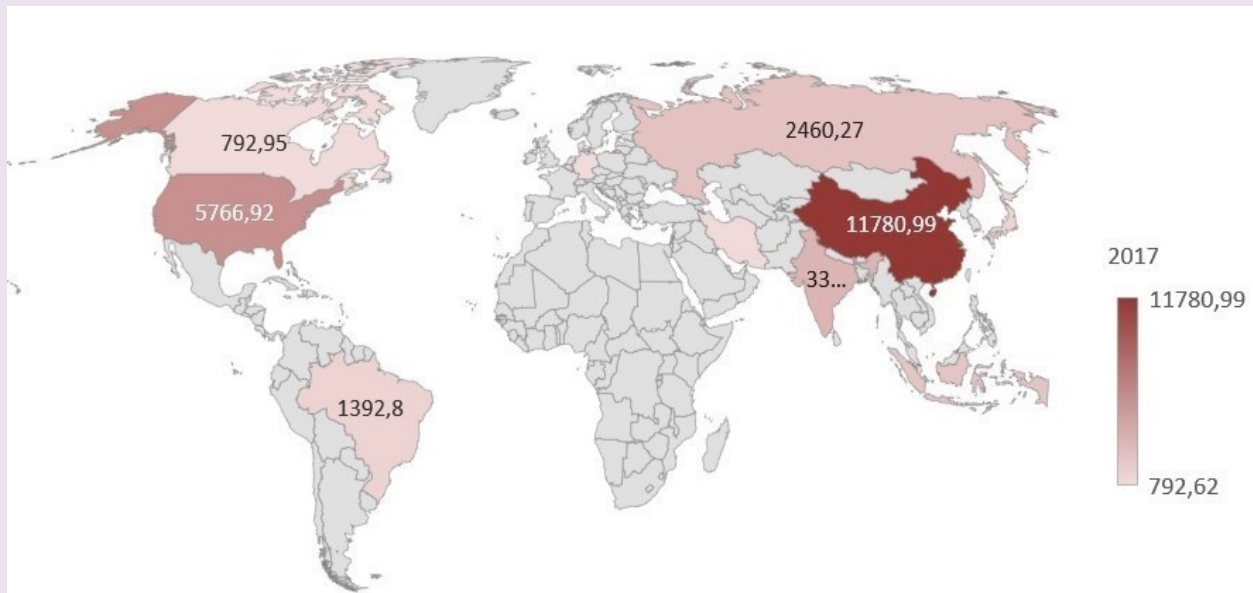
Pembangunan rendah karbon dan berbagai variannya diyakini menjadi solusi dalam menangani krisis iklim yang sedang kita hadapi. Di tingkat global, kesadaran untuk melakukan transformasi ke arah pembangunan rendah karbon sudah mulai menguat sejak beberapa dekade lalu dan menemukan momentumnya dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) tentang perubahan iklim tahun 2015. Kesepakatan Paris merupakan sebuah keberhasilan negosiasi global dalam penanganan perubahan iklim dan penerapan pembangunan rendah karbon, di mana semua negara setuju untuk memperkuat komitmennya dalam rangka menurunkan emisi karbon sebagai NDC masing-masing negara yang akan berkontribusi pada global *stocktake*.

Indonesia menjadi perhatian dunia dalam penanganan perubahan iklim ini karena berada dalam 10 besar negara penghasil emisi karbon pada tahun 2017.¹ Pada tahun 2017, Indonesia menghasilkan emisi sebesar 2275,4 MtCO₂e. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelumnya

¹ Kertas kebijakan ini belum memperoleh data terbaru tingkat emisi masing-masing negara di dunia. Data terakhir yang kami peroleh adalah tahun 2017.

sebesar 2.228,89 MtCO₂e, dan menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 2776,53 MtCO₂e. Sementara 4 negara penghasil emisi yang lebih besar dari Indonesia pada tahun 2017 masing-masing adalah China dengan emisi karbon sebesar 11.780,99 MtCO₂e, Amerika Serikat yang memproduksi emisi karbon tahun 2017 sebanyak 5766,92 MtCO₂e, India menyebarkan emisi gas rumah kaca ke udara sebanyak 3.356,7 MtCO₂e, dan Rusia sebesar 2.460,27 MtCO₂e.

Gambar 1. Peta 10 negara penghasil emisi terbesar tahun 2017 (MtCO₂e)



Sumber: *Climate Watch (2021)*²

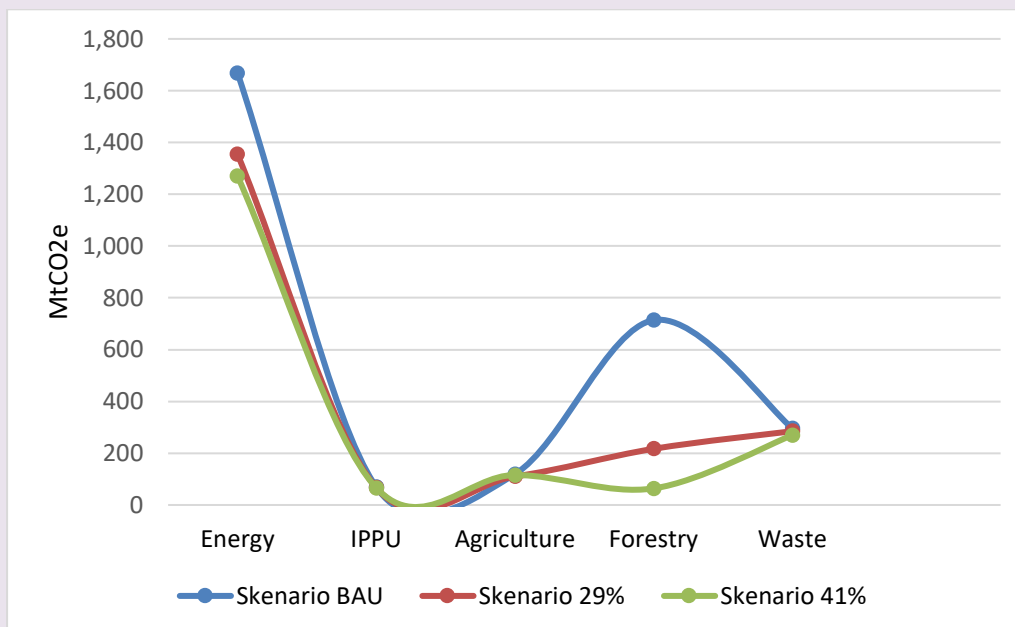
Dengan posisi demikian, Indonesia tidak punya pilihan kecuali melakukan upaya perbaikan dalam pembangunan ekonominya dan melakukan transformasi yang lebih radikal dari *business as usual* ke arah yang berkelanjutan. Proses ini sudah dimulai pada satu dekade lalu melalui kebijakan RAN-GRK yang dikukuhkan melalui Perpres No.61 Tahun 2011. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Skenario penurunan emisi yang menjadi NDC Indonesia terlihat dalam gambar 2.

RAN-GRK sudah berjalan bagus, namun belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, Bappenas pada tahun 2017 bersama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga dan mitra-mitra lainnya mempersiapkan transformasi RAN-GRK keapda kebijakan pembangunan rendah karbon. Upaya ini tidak saja dapat memperkuat arah pembangunan di Indonesia yang lebih berkelanjutan, tetapi juga membuka babak baru transisi dari *business as usual* kepada pembangunan berkelanjutan. Apalagi, kebijakan pembangunan rendah karbon ini sudah menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Perpres No.18 Tahun 2020.

² Buka tautan https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2017&start_year=1990, diunduh tanggal 20 Februari 2021. Dalam penyusunan dokumen PRK, Bappenas juga merujuk data dari WRI.

Dalam pembangunan rendah karbon ini, Indonesia tetap akan memberikan prioritas penurunan emisi pada sejumlah sektor penghasil emisi terbesar, yakni sektor energi, kehutanan dan penggunaan lahan, sampah, pertanian, dan proses industri serta penggunaan produk industri (IPPU). Dalam sektor-sektor inilah, transformasi pembangunan rendah karbon prioritas akan diterapkan. Kalau melihat grafik di bawah ini, maka sektor energi memberi tantangan yang sangat besar karena kontribusi pada emisi karbon juga cukup besar. Indonesia masih mengandalkan penggunaan batubara yang kotor dan penghasil emisi karbon terbesar untuk penghasil energi utama.

Gambar 2. Skenario Penurunan Emisi Karbon Indonesia 2030



Sumber: KLHK (2018)

Keberhasilan dalam transformasi dan penerapan kebijakan rendah karbon di Indonesia akan berdampak pada banyak dimensi lainnya dalam kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan. Salah satu manfaat positif dari transformasi pembangunan rendah karbon ini adalah penciptaan lapangan kerja hijau (*green jobs*). Sejumlah penelitian telah memprediksikan bahwa pembangunan rendah karbon akan bisa memberikan jumlah lapangan kerja yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan untuk jangka panjang dibandingkan dengan pendekatan *business as usual*.

1.2 POTENSI GREEN JOBS DALAM PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

Green jobs atau lapangan kerja hijau merupakan konsekuensi masa depan dari upaya transformasi pembangunan rendah karbon. Lapangan kerja hijau ini juga merupakan kata kunci dalam pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), karena perkembangan ekonomi hijau akan melahirkan berbagai peluang kerja yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, dalam satu dekade ke depan, ekonomi yang tidak ramah lingkungan akan cenderung menjadi usang dan ditinggalkan. Hal ini akan terjadi jika upaya penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon

berhasil dilaksanakan seiring dengan menguatnya komitmen para pihak di tingkat global dalam penanganan perubahan iklim.

Laporan UNEP, ILO, IOE, ITUC, dan Green Jobs Initiative tahun 2008 menyebutkan bahwa semakin besar orientasi pada keberlanjutan, maka kondisi ini akan mempengaruhi perubahan pasar lapangan kerja dalam beberapa kemungkinan skenario. Pembangunan rendah karbon diprediksi akan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan baru (*green jobs*), sekaligus menggeser dan atau mematikan sejumlah lapangan kerja lain yang tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Tabel di bawah ini memperlihatkan kecenderungan dari skenario pembangunan rendah karbon dan dampaknya terhadap *green jobs*.

Tabel 1. Skenario Green Jobs Sebagai Dampak Pembangunan Rendah Karbon

No.	Skenario Green Jobs	Kecenderungan
1.	Penambahan green jobs	Akan terjadi penambahan lapangan kerja baru di berbagai sektor dalam ekonomi hijau;
2.	<i>Substituted</i>	Beberapa jenis lapangan kerja akan tergantikan (<i>substituted</i>), misalnya lapangan kerja di sektor energi akan tergantikan dengan lapangan kerja di sektor energi bersih (<i>renewable energy</i>).
3.	Pekerjaan tertentu hilang	Pekerjaan dalam sektor tertentu yang tidak berkelanjutan akan hilang karena tidak selaras dengan perkembangan ekonomi hijau.
4.	Penyesuaian	Banyak pekerjaan yang masih ada (<i>existing</i>), kemungkinan akan didefinisi kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi hijau.

Sumber: UNEP (2008)

Pelaksanaan kebijakan pembangunan rendah karbon akan mempengaruhi skenario dalam tabel di atas. Yang kita harapkan adalah terjadinya penambahan pekerjaan hijau (*green jobs*) secara signifikan, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan hilangnya jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada saat ini, karena ada kemungkinan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan pembangunan rendah karbon yang akan diterapkan di seluruh dunia dalam satu dekade yang akan datang.

Di sisi lain, perkembangan lapangan kerja hijau (*green jobs*) ke depan sangat tergantung pada kemajuan dalam ekonomi hijau (*green economy*) yang berdampak pada pertumbuhan hijau (*green growth*). Semakin cepat transformasi ke arah ekonomi hijau, akan semakin bagus pula dalam pertumbuhan hijau tersebut. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh New Climate Economy (2018) menyebutkan bahwa pembangunan rendah karbon dengan ekonomi hijau akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat global sebesar US\$ 26 Triliun atau

IDR 377.000 Triliun (kurs Rp. 14.500) sampai tahun 2030, dibandingkan dengan pendekatan *business as usual*.

Gambar 3. Potensi Green Jobs di tingkat Global dan Indonesia



Sumber: NCE (2018) dan Bappenas (2019)

Pertumbuhan ekonomi sebesar US\$ 26 Triliun menurut NCE (2018) ini akan menghasilkan lebih dari 65 juta pekerjaan baru pada tahun 2030, serta partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan yang akan lebih tinggi. Prediksi yang sama juga disampaikan oleh ILO (2016) bahwa pembangunan rendah karbon akan menghasilkan lebih dari 60 juta lapangan pekerjaan baru. Sementara untuk Indonesia, Bappenas (2019) memperkirakan bahwa penerapan pembangunan rendah karbon akan menghasilkan 15,3 juta lapangan kerja baru pada tahun 2045 dengan tingkat upah yang jauh lebih baik.

Laporan ILO juga memperlihatkan bahwa sebanyak 1,2 miliar pekerjaan (40% dari total pekerjaan) sangat tergantung pada lingkungan hidup yang sehat. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat global akan sangat mendukung keberlangsungan 1,2 miliar pekerjaan di dunia. Sebaliknya, mempertahankan pendekatan *business as usual* berpotensi menghilangkan 1,2 miliar pekerjaan ini.

Tentu bukan hanya lapangan pekerjaan yang akan dihasilkan dari pembangunan rendah karbon di tingkat global dan Indonesia. Laporan NCE (2018) juga menampilkan beberapa data menarik terkait potensi pembangunan rendah karbon di tingkat global dibandingkan dengan *business as usual*, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Potensi Nilai Ekonomi Pembangunan Rendah Karbon

No.	Potensi Nilai Ekonomi dalam Pembangunan Rendah Karbon	Potensi Benefit
1.	Pembangunan rendah karbon akan menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat besar dibandingkan dengan <i>business as usual</i> .	US\$ 26 Triliun sampai tahun 2030.
2.	Pembangunan kota yang terkoordinasi, kompak, dan terhubung, dapat menghemat pemborosan biaya yang sangat signifikan.	US\$ 17 Triliun sampai tahun 2050.
3.	Pengembangan pertanian dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang cukup signifikan.	US\$ 2 Triliun per tahun.
4.	Perdagangan karbon merupakan potensi ekonomi besar yang akan menghasilkan banyak pekerjaan baru dan nilai ekonomi.	US\$ 2,8 Triliun per tahun pada 2030.
5.	Melakukan restorasi 160 juta hektar lahan rusak dan terdegradasi, dapat menghasilkan nilai ekonomi besar.	US\$ 84 Miliar per tahun.

Apa yang dapat dibaca dari data-data yang ditampilkan dalam tabel 2 di atas? Data-data tersebut memperlihatkan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan sejumlah pihak (kertas kebijakan ini merujuk pada data NCE dan ILO), memberi harapan baru bahwa pembangunan rendah karbon akan bisa menghasilkan jumlah pekerjaan yang lebih banyak, kualitas pekerjaan yang lebih baik, serta keberlanjutan pekerjaan yang lebih terjamin, dibandingkan dengan pendekatan *business as usual* yang selama ini dijalankan. Namun demikian, data-data penelitian ilmiah tersebut baru bersifat prediktif. Tantangan kita semua adalah bagaimana bisa merujukkan transformasi ke arah pembangunan berkelanjutan tersebut.

1.3 TANTANGAN PERLUASAN GREEN JOBS BERBASIS AKTOR EKONOMI

Tantangan perluasan green jobs di Indonesia adalah sama dengan tantangan dalam memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon itu sendiri. Jika kebijakan pembangunan rendah karbon bisa kita transformasikan dengan baik, maka *green jobs* juga akan bisa dihasilkan

kepada generasi muda kita ke depan. Sebaliknya, jika transformasi ke pembangunan rendah karbon tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka potensi *green jobs* seperti yang sudah dianalisis secara ilmiah di atas, juga tidak mungkin bisa diwujudkan.

Karena itu, kita perlu melakukan analisis sejauhmana tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan secara holistik kebijakan pembangunan rendah karbon dalam semua sektor, khususnya dalam sektor-sektor yang berkontribusi besar pada emisi karbon. Secara umum, tantangan dalam transformasi menuju kebijakan pembangunan rendah karbon terjadi di berbagai arena dan melibatkan stakeholder utama dalam pembangunan ekonomi hijau ini. Dari sisi dinamika stakeholder dalam pembangunan rendah karbon ini, tantangan yang dihadapi dapat dianalisis secara ringkas dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Peta Aktor Ekonomi dalam Transformasi PRK dan Green Jobs

No.	Aktor Ekonomi	Transformasi PRK dan Green Jobs
1.	Pemerintah/BUMN	Meskipun pemerintah sudah mulai melakukan transformasi ke arah pembangunan rendah karbon, namun aktor ekonomi yang berafiliasi dengan pemerintah, yakni BUMN belum menjadi bagian utama dalam arus utama pembangunan rendah karbon. Karena itu, tantangan utama adalah bagaimana pemerintah dengan otoritas yang dimilikinya bisa melakukan transformasi BUMN untuk mulai menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon. Tranformasi juga dapat didukung oleh salah satunya pembacaan tantangan pada peta jalan (roadmap) dari keuangan berkelanjutan dalam rangka pembiayaan pembangunan rendah karbon.
2.	Korporasi Swasta	Korporasi swasta adalah aktor ekonomi utama yang perlu diubah paradigmanya. Selama ini, korporasi swasta adalah pelaku utama dalam <i>business as usual</i>. Transformasi korporasi swasta ini tidak mudah dilakukan karena melibatkan jumlah aset ekonomi <i>business as usual</i> yang sangat besar, termasuk teknologi dan infrastruktur ekonominya. Karena itu, melalui otoritas dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kita berharap upaya transformasi kepada korporasi swasta ini bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, korporasi swasta merupakan aktor yang sangat mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tranformasi energy bersih (<i>green energy</i>) seperti yang terjadi di sejumlah negara Skandinavia. Sejauh transformasi ini efisien dan menguntungkan, korporasi biasanya mudah diajak menuju <i>green economy</i>. Indonesia bisa mulai melakukan transformasi teknologi dan penggunaan energi

		bersih untuk korporasi swasta ini.
3.	UMKM	UMKM adalah aktor ekonomi yang sebenarnya mudah untuk diajak bertransformasi ke arah pembangunan rendah karbon. Pelaku ekonomi ini cenderung tidak mau dipusingkan dengan berbagai konsep dan pendekatan dalam pembangunan. Jika perubahan terjadi, mereka adalah pihak yang paling mudah untuk menyesuaikan karena skala ekonomi mereka cenderung mudah bertransformasi.
4.	Rumah Tangga	Rumah tangga adalah konsumen penting dalam rantai ekonomi. Sebagai konsumen, ada dua kemungkinan yang terjadi terkait dengan kebijakan pembangunan rendah karbon. <i>Pertama</i>, rumah tangga yang mempunyai literasi bagus dalam isu keberlanjutan dan lingkungan hidup, akan menjadi kelompok penekan untuk transformasi pembangunan rendah karbon. Kedua, konsumen dengan literasi rendah tentang pembangunan rendah karbon akan ikut arus sesuai dengan kecenderungan perubahan yang ada. Di titik ini, pemerintah dan semua pihak harus melakukan upaya edukasi kepada rumah tangga dan konsumen untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan tidak mengonsumsi produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Jika ini terjadi, maka kekuatan konsumen akan memaksa korporasi untuk melakukan transformasi ke arah produksi rendah karbon juga.
5.	Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi	Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi dalam hal ini tergolong sebagai sektor academia, dimana ilmu pengetahuan dikelola dan dikembangkan sesuai dengan bidang keilmuan yang beragam. Perhatian tentang pembangunan rendah karbon perlu untuk mulai dikenalkan dan dijabarkan pada pembelajaran di lembaga pendidikan seperti Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi untuk memberikan pemahaman awal dan juga membuka peluang yang besar bagi Link and Match dari Green Jobs di Indonesia. Generasi muda terpelajar yang memahami dan berkecimpung dalam green jobs akan menjadi fasilitator pembangunan rendah karbon sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi.

BAB 2

PARTISIPASI PUBLIK UNTUK PERLUASAN *GREEN JOBS*

2.1 URGENSI GREEN ENGAGEMENT/KOLABORASI

Seperti sudah dibahas dalam Kertas Kebijakan sebelumnya terkait dengan pembangunan rendah karbon ini, partisipasi publik merupakan sebuah upaya untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Partisipasi publik bukan sekedar prosedur untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, melainkan sebuah hak yang dimiliki masyarakat untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang berakibat pada kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah hak, maka partisipasi publik menjadi keharusan. Karena itu, di tingkat global, dalam sistem demokrasi liberal dan demokrasi deliberatif, partisipasi publik merupakan bagian dari proses demokrasi itu sendiri.

Sebagai negara demokrasi, maka Indonesia merupakan negara yang membuka ruang bagi partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Tantangannya adalah tidak semua proses partisipasi publik berjalan dengan bagus. Terkadang, mekanisme politik dan teknokratik lebih mendominasi proses perumusan kebijakan publik dibandingkan dengan mekanisme yang lebih partisipatif.

Karena itu, seiring dengan upaya pemerintah dalam transformasi menuju pembangunan rendah karbon, maka partisipasi publik sudah harus menjadi bagian dari proses pembangunan rendah karbon itu sendiri. Kertas kebijakan ini menggunakan istilah *green engagement* (pelibatan hijau) atau *green collaboration* (kolaborasi hijau) untuk bentuk partisipasi publik dalam memperkuat pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Pendekatan green engagement/collaboration ini mengacu pada spektrum partisipasi publik yang dikembangkan oleh IAP2, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4. Spektrum Partisipasi Publik IAP2



Lima tingkatan pelibatan masyarakat dalam spektrum partisipasi publik IAP2 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Inform* (menginformasikan), adalah menyediakan informasi yang obyektif dan seimbang, membantu memahami dan mencari alternatif solusi terhadap masalah.
2. *Consult* (mengkonsultasikan), adalah mendapatkan masukan masyarakat terkait analisis, alternatif, dan atau sebuah keputusan.
3. *Involve* (melibatkan), adalah bekerja secara langsung dengan masyarakat melalui sebuah proses untuk memastikan aspirasi masyarakat secara konsisten dipertimbangkan.
4. *Collaborate* (membangun kolaborasi), adalah bermitra dengan masyarakat di setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk mengidentifikasi dan membangun solusi alternatif.
5. *Empower* (memberdayakan), adalah menempatkan pembuatan keputusan final di tangan masyarakat.

Dalam kebijakan pembangunan rendah karbon dan upaya menciptakan *green jobs*, maka spektrum partisipasi publik di atas bisa digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Seperti sudah dibahas dalam kertas kebijakan pertama dan kertas kebijakan kedua, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan rendah karbon berasal dari berbagai arena, baik kondisi status quo (*business as usual*), kebijakan pusat dan daerah, tantangan di dalam birokrasi, transformasi korporasi, dan literasi/kesadaran masyarakat tentang pembangunan rendah karbon yang masih rendah.

2.2 KEBUTUHAN GREEN ENGAGEMENT/KOLABORASI

Bagaimana *green engagement*/kolaborasi diterapkan dalam penguatan pembangunan rendah karbon dan upaya menciptakan *green jobs*? Berbasis pada spektrum partisipasi publik IAP2 di atas, pemerintah dan semua pihak bisa menggunakan tingkatan spektrum tersebut untuk memperkuat partisipasi dalam penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon. Tentu tidak mudah saat kita membangun partisipasi, atau dalam konteks ini pelibatan hijau (*green engagement*) berbasis aktor-aktor yang terlibat langsung dalam rantai ekonomi: produksi dan konsumsi. Tidak mudah juga melakukan transformasi ke arah produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Karena itu, *green engagement* perlu mulai diperkuat oleh pemerintah dan semua pihak dalam rangka transformasi pembangunan rendah karbon. Tabel di bawah ini memperlihatkan penggunaan spektrum partisipasi publik berbasis aktor untuk memperkuat pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Tabel 3. Penggunaan Spektrum Green Engagement untuk Memperkuat PRK

No.	Aktor Ekonomi	Penggunaan Spektrum Green Engagement
1.	BUMN/D	Untuk semua aktor ekonomi, baik BUMN/D, korporasi

2.	Korporasi Swasta	swasta, UMKM dan rumah tangga, Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi, pemerintah bisa menggunakan spektrum green engagement untuk memperkuat transformasi dan implementasi pembangunan rendah karbon berbasis aktor ini, yakni sebagai berikut: 1. <i>Inform.</i> Tingkatan spektrum paling bawah ini bisa digunakan kepada semua aktor ekonomi, baik BUMN/D, korporasi swasta, UMKM, dan rumah tangga, serta akademisi dalam bentuk Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi untuk memperkuat literasi aktor tentang pembangunan rendah karbon. Pemerintah dan semua pihak bisa melakukan tahapan ini melalui berbagai kegiatan sosialisasi, diskusi, dan kampanye melalui berbagai media, seperti televisi, media online dan media sosial. 2. <i>Consult.</i> Pemerintah perlu melakukan konsultasi dengan kalangan BUMN/D, korporasi swasta dan UMKM, serta Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi tentang bagaimana kesiapan mereka dalam mendukung transformasi pembangunan rendah karbon. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para aktor ini. Serta bagaimana peluang transformasi dari <i>business as usual</i> yang mereka lakukan ke pendekatan berkelanjutan. Dalam hal ini, bisa dibangun dialog kemungkinan peluang lapangan kerja hijau (<i>green jobs</i>) yang bisa dihasilkan masing-masing aktor dalam transformasi pembangunan rendah karbon ini. 3. <i>Involve.</i> Pemerintah dan semua pihak perlu mulai melibatkan secara lebih intensif semua aktor ekonomi, khususnya BUMN/D, korporasi swasta dan UMKM, serta sektor akademisi melalui Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi dalam upaya penguatan pembangunan rendah karbon di berbagai arena. Pemerintah bisa mengajak perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM nasional dan internasional, serta lembaga-lembaga donor untuk memperkuat proses pelibatan aktor-aktor ekonomi ini dalam pembangunan rendah karbon. 4. <i>Collaborate.</i> Pemerintah dan semua pihak perlu membangun kolaborasi dalam bentuk kemitraan strategis dengan aktor-aktor ekonomi, yakni BUMN/D, korporasi swasta, dan UMKM, serta sektor akademisi melalui Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi dalam membangun dan
3.	UMKM	
4.	Rumah Tangga	

		mentransformasikan aktivitas ekonomi mereka yang masih berbasis <i>business as usual</i> ke arah <i>green economy</i>. Untuk memperkuat kolaborasi dengan aktor-aktor ekonomi ini, pemerintah bisa mengajak perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM nasional dan internasional, serta lembaga-lembaga donor untuk memperkuat proses kolaborasi dalam pembangunan rendah karbon ini. 5. <i>Empower</i>. Proses <i>empower</i> (pemberdayaan) adalah menyerahkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat atau aktor-aktor ekonomi. Empower ini ini hanya akan bisa berjalan jika proses transformasi ke arah <i>green economy</i> sudah menguat. Dalam kondisi ini, semua aktor bisa berperan sesuai dengan kekuatan masing-masing dalam mentransformasikan aktivitas ekonomi mereka dan melakukan upaya penciptaan lapangan kerja hijau (<i>green jobs</i>).
--	--	--

BAB 3

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Upaya untuk memperkuat pembangunan rendah karbon sudah menjadi kebutuhan primer di Indonesia. Pemerintah sudah mempunyai sejumlah perangkat kebijakan untuk memperkuat pembangunan rendah karbon, baik dari sisi perencanaan pembangunan maupun dari sisi lainnya. Namun demikian, upaya penguatan pembangunan rendah karbon ini membutuhkan dukungan yang lebih luas dari aktor-aktor ekonomi, baik BUMN/D, korporasi swasta, UMKM dan rumah tangga, serta sektor akademisi diperkuat melalui Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi. Hal ini berkaitan erat dengan upaya penciptaan lapangan kerja hijau (*green jobs*) di masa yang akan datang.

Karena itu, kertas kebijakan ini memberikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Potensi *green jobs* dalam pembangunan rendah karbon sangat besar, baik di tingkat nasional maupun global. Jika pembangunan rendah karbon berjalan dengan baik, maka sebanyak 65 juta *green jobs* di tingkat global akan tercipta pada 2030 dan 15,3 juta *green jobs* di Indonesia akan tercipta pada tahun 2045. Karena itu, diperlukan kesungguhan pemerintah dan semua pihak untuk memperkuat pembangunan rendah karbon di semua aspek dan arena.
2. Dalam penciptaan *green jobs*, aktor-aktor ekonomi adalah pihak yang perlu diperkuat literasinya tentang pembangunan rendah karbon, baik BUMN/D, korporasi swasta, UMKM, dan rumah tangga, serta sektor akademisi diperkuat melalui Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi. Jika aktor-aktor ekonomi ini memberikan dukungan yang bagus dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon, maka kita bisa berharap bahwa upaya penciptaan lapangan kerja hijau juga akan meningkat ke depan.
3. *Co-Knowledge* membangun platform komunikasi tentang Pembangunan Rendah Karbon, seperti ketelibatan dalam Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICTF) atau *Green Taxonomy*.
4. Untuk memperkuat partisipasi aktor-aktor ekonomi tersebut, yakni BUMN/D, korporasi swasta, UMKM, dan rumah tangga, serta sektor akademisi diperkuat melalui Perguruan Tinggi dan Lembaga Vokasi dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan penciptaan lapangan kerja hijau, maka spektrum partisipasi publik/*green engagement* bisa digunakan oleh pemerintah dan semua pihak, sesuai fungsi dan kebutuhan. Lima spektrum *green engagement* yang bisa digunakan adalah *inform*, *consult*, *involve*, *collaborate*, dan *empower*.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Bappenas. (2019). *Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2019). *Laporan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon*. Jakarta: Bappenas.
- ILO. (2016). *Green Jobs Progress Report 2014-2015*. Geneva: International Labour Organization
- KLHK. (2018). *Laporan Inventori Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi*. Jakarta: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK.
- KLHK. (2018). *Indonesia Second Biennial Update Report*. Jakarta: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- NCE. (2018). *Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21th Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times*. Washington: New Climate Economy c/o World Resource Institute.
- UNEP. (2008) *Green Jobs Initiative tahun 2008 berjudul Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low Carbon World*. Nairobi: United Nations Environment Program.

Aturan Perundang-Undangan

- UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*).
- Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)
- Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Online

https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2017&start_year=1990

LAMPIRAN

Tim Penulis

Kertas Kebijakan (KK) ini merupakan tiga serangkai kertas kebijakan tentang Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. KK pertama berjudul *Penguatan Partisipasi Publik untuk Mendukung Kebijakan Rendah Karbon di Indonesia*. KK kedua berjudul: *Penguatan Partisipasi Publik dalam Transformasi MRV menuju ETF (Enhanced Transparency Framework) dalam Pembangunan Rendah Karbon*, dan KK ketiga berjudul *Penguatan Partisipasi Publik dalam Perluasan Lapangan Kerja Hijau (Green Jobs)*.

Ketiga kertas kebijakan tersebut merupakan satu rangkaian produk dari kertas kebijakan yang dihasilkan IAP2 Indonesia dalam rangka mendukung Bappenas dan pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Kebijakan pembangunan rendah karbon ini sudah menjadi bagian dari RPJMN 2020-2024 dan membutuhkan penguatan di berbagai arena.

Ketiga Kertas Kebijakan ini disusun tim peneliti senior IAP2 Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Darmawan Salman**, adalah penasehat IAP2 Indonesia dan profesor sosiologi pertanian di Universitas Hasanuddin.
2. **Alizar Anwar, MBA., PhD. Cand.**, adalah penasehat IAP2 Indonesia.
3. **Aldi Muhammad Alizar, SE.** adalah Ketua IAP2 Indonesia dan Board IAP2 Internasional.
4. **Dr. Cand. Yusdi Usman**, adalah Wakil Ketua IAP2 Indonesia dan CEO Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB).
5. **Ratih Damayanti, ST., MM.** adalah Wakil Ketua IAP2 Indonesia.

Penulisan kertas kebijakan ini juga didukung oleh asisten peneliti: **Fikri Amarillo Adiprana, ST.**

Metodologi

Penulisan kertas kebijakan ini berbasis pada dua cara pengumpulan data, yakni data primer dari proses FGD dan Webinar nasional tentang pembangunan rendah karbon di Indonesia, dan data sekunder dari analisis dokumen. FGD online dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020 dan 17 Desember 2020. Sedangkan webinar nasional dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2021. Untuk studi dokumen, data untuk analisis dalam kertas kebijakan ini juga berasal dari berbagai dokumen dalam bentuk laporan pemerintah, laporan lembaga-lembaga internasional, laporan lembaga penelitian, artikel ilmiah, informasi online, dan lain-lain. Untuk memastikan validitas data, dilakukan proses triangulasi, *member checking*, dan *peer review*.

Profil IAP2 Indonesia

IAP2 Indonesia merupakan sebuah organisasi afiliasi dari IAP2 Internasional, yang bekerja dalam memperkuat partisipasi publik. IAP2 Indonesia berdiri tahun 2011 dan sudah berperan dalam berbagai proses perubahan sosial di Indonesia, khususnya dalam mendorong penguatan partisipasi publik di berbagai arena.

'Partisipasi publik' berarti melibatkan mereka yang dipengaruhi oleh suatu keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan memberi peserta informasi yang mereka butuhkan untuk dilibatkan dengan cara yang berarti, dan itu mengkomunikasikan kepada peserta bagaimana masukan mereka mempengaruhi keputusan.

Sejak tahun 2020, IAP2 Indonesia bekerjasama dengan UNESCAP dan Bappenas dalam memperkuat partisipasi publik, dalam kerangka *Year of Public Participation 2023*. IAP2 Indonesia juga bekerjasama dengan GIZ dalam memperkuat partisipasi publik untuk mendukung kebijakan rendah karbon di Indonesia. Saat ini, IAP2 Indonesia juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat partisipasi publik di berbagai arena.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan kunjungi laman website IAP2 Indonesia: www.iap2.or.id.